



**H. SUNARYANTA**  
Bupati Gunungkidul



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**RINGKASAN**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**TAHUN 2020**



**HERI SUSANTO, S.Kom., MSI.**  
Wakil Bupati Gunungkidul

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Saudara-saudaraku warga masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang kami hormati dan cintai.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020. Penyampaian ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya sepanjang Tahun Anggaran 2020.

Amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kami sajikan sebagai berikut :

**A. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

**1. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : Umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan; dan standar hidup layak. Berdasarkan data BPS dalam Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2021, dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat dilihat dari data angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul mencapai 74,12 tahun. Dimensi dasar pengetahuan dilihat dari angka harapan lama sekolah yang mencapai 12,97%, dan rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,21 tahun. Dimensi dasar standar hidup layak dapat diketahui melalui data pengeluaran riil per Kapita yang disesuaikan tahun 2020 yang mencapai Rp. 9.486.000,00. Berdasarkan data capaian dimensi dasar pembentuk IPM dimaksud, capaian IPM Kabupaten Gunungkidul sebesar 69,98.

**Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul**

Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,12 tahun	12,97%	7,21 tahun	Rp. 9.486.000,-	69,98

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

Berdasarkan data capaian IPM Tahun 2020 dimaksud, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan bersama baik oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Gunungkidul untuk lebih meningkatkan etos kerja dalam upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi.

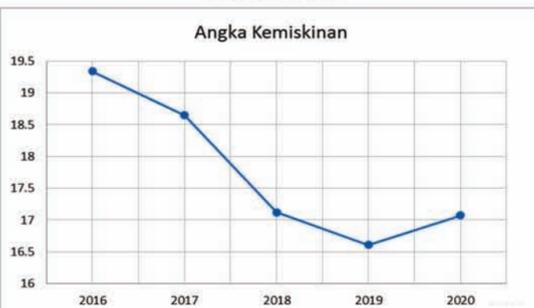
**2. Angka Kemiskinan**

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai input program pembangunan berikutnya agar dapat berjalan lebih optimal. Indikator peningkatan kesejahteraan, secara riil akan terlihat dari tingkat pendapatan masyarakat. Permasalahan mendasar dalam memperoleh data pendapatan rumah tangga sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi budaya dalam masyarakat kita yang kurang terbuka atau bahkan tidak bersedia memberikan informasi yang riil dan terinci terkait hal tersebut. Hal ini tentu saja berdampak terhadap akurasi data pendapatan rumah tangga yang diperoleh.

Salah satu pendekatan yang digunakan BPS guna mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, antara lain melalui penelitian tingkat penghasilan rumah tangga yang dilakukan dengan pendekatan konsumsi (consumption approach). Dengan pendekatan tersebut akan diperoleh indikator kesejahteraan penduduk yang dihasilkan dari data konsumsi rumah tangga yaitu penduduk miskin, distribusi pendapatan dan pola konsumsi rumah tangga. Secara umum penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (proksi pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak diwilayahnya. Kebutuhan hidup layak diterjemahkan dari nilai rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makan setara dengan 2.100 kilo kalori/orang/hari, sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan esensial lainnya. Penduduk miskin menurut definisi BPS merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka kebutuhan minimal.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul dalam kurun 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, menunjukkan anomali yang terjadi khususnya pada Tahun 2020. Tren penurunan angka kemiskinan, belum dapat dipertahankan pada Tahun 2020, seperti tampak dalam grafik yang kami sajikan sebagai berikut :

**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2020**



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 senantiasa mengalami penurunan secara stabil. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat 19,34%, pada Tahun 2017 tercatat sebesar 18,65%, Tahun 2018 tercatat sebesar 17,12%, dan pada Tahun 2019 turun menjadi 16,61%. Hal ini sesuai dengan target Tahun 2019 yang dicanangkan sebesar 17,91 persen. Kecenderungan ini awalnya diharapkan akan mampu dijaga bahkan ditingkatkan, sehingga target dalam RPJMD 2016-2021 dimana angka kemiskinan pada akhir tahun perencanaan yakni Tahun 2021 sebesar 16,52 persen masih optimis dapat direalisasikan. Namun kondisi diluar kemampuan kendali yang terjadi di Tahun 2020 telah memaksa untuk mengubah kebijakan, strategi, dan bahkan target yang telah dicanangkan. Kondisi bencana non alam pandemi Covid-19 telah menyebabkan kecenderungan penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan, dimana pada Tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 17,07%.

Penurunan angka kemiskinan yang dicapai hingga Tahun 2019 dan upaya recovery yang dilakukan pada Tahun 2020 dalam menekan angka kemiskinan, antara lain diupayakan melalui bentuk Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022. Strategi penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;

dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Penjabaran lebih lanjut dari strategi penanggulangan kemiskinan melalui program yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok program, yaitu : a) kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; b) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; c) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan d) program lain yang secara langsung ataupun tidak langsung meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

**3. Angka Pengangguran**

Pada Tahun 2020, dilihat dari data penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul masih berada pada periode emas secara demografi. Jumlah penduduk dengan kategori usia produktif (15 tahun sampai dengan 64 tahun) jumlahnya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2020 mencapai angka 67,25% atau tercatat sebanyak 474.959 jiwa. Angka tersebut jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif (dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) yang berjumlah 299.650 jiwa atau dengan persentase 32,75% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 yang tercatat sebanyak 774.609 jiwa.

Berbicara masalah ketenagakerjaan, salah satu indikator penting adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPak merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPak memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Dengan melihat indikator TPak akan dapat dilihat besarnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah serta dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY**

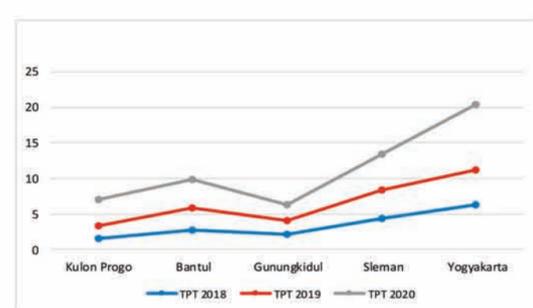
Kabupaten/Kota	TPAK		
	2018	2019	2020
Kulon Progo	76.50	76.70	77.88
Bantul	73.87	73.18	74.45
Gunungkidul	76.81	76.31	65.30
Sleman	71.22	70.52	70.51
Yogyakarta	69.33	69.75	68.62

Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 tercatat sebesar 65,30%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari setiap 1.000 penduduk usia produktif atau usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Gunungkidul, terdapat sekitar 653 penduduk yang berstatus sebagai angkatan kerja. Namun demikian penurunan ataupun peningkatan TPak belum dapat secara langsung menggambarkan kondisi baik buruknya ketenagakerjaan di suatu wilayah.

Indikator kedua yang digunakan untuk melihat permasalahan ketenagakerjaan adalah menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) guna mengukur pengangguran. Dengan melihat capaian TPT, dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau juga dapat berarti bahwa berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Tahun 2018 - 2020**



Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2021 (diolah)

Dengan melihat data TPT, akan dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

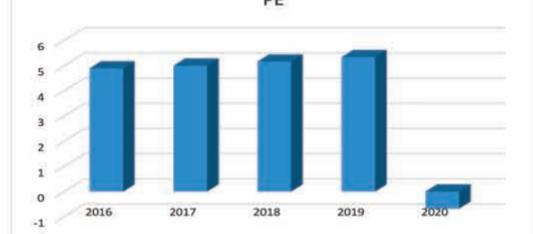
Tingkat Pengangguran TPT merupakan kondisi keterbalikan dari TPak, dimana wilayah dengan angka TPT tertinggi di DIY terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 9,16%, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 5,09%, Kabupaten Bantul sebesar 4,06%, dan Kabupaten Kulonprogo yang mencapai 3,71%. Secara regional, angka TPT Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 menjadi yang terendah di DIY yakni sebesar 2,16%. Modal sosial berupa etos kerja yang tinggi dan daya serap lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul mendukung rendahnya TPT di Kabupaten Gunungkidul.

Secara umum, berdasarkan data ini juga dapat disimpulkan bahwa semakin besar wilayah perkotaan pada suatu daerah, berpengaruh terhadap semakin menurunnya penawaran tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya untuk masuk ke lapangan kerja di perkotaan. Hal ini terjadi karena lapangan kerja di perkotaan lebih banyak pada sektor formal yang membutuhkan ijazah atau syarat-syarat tertentu.

**4. Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun di suatu wilayah. PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020 sebesar Rp. 18.974,2 milyar atau meningkat 0,7% dari Tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp. 18.844,7 milyar. Pemberi kontribusi terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 masih diberikan oleh kelompok sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (1) yakni sebesar 24,67%, dan diikuti secara berturut-turut pada 5 besar sektor bangunan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan (2), industri pengolahan (3), perdagangan besar dan reparasi (4), dan peringkat (5) ditempati sektor bangunan.

**PE**



Sumber : Data BPS, Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2021

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2020 sebesar Rp. 13.513,2 milyar, atau turun bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp. 13.605,1 milyar. Data ini menunjukkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 bila dibandingkan dengan Tahun 2019. Hal ini terjadi tidak lepas dikarenakan oleh dampak kondisi bencana non alam pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020, dan fenomena penurunan ini dialami oleh hampir seluruh daerah. Berikut gambaran pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunungkidul dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Dengan mengetahui data PDRB maka laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui. Angka Pertumbuhan Ekonomi (PE) di suatu wilayah dapat diketahui dengan membandingkan PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Namun untuk mengurangi pengaruh laju inflasi, maka data PDRB yang digunakan adalah PDRB ADHK. Melalui perhitungan tersebut, diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 adalah sebesar minus 0,68%. Angka tersebut menunjukkan anomali laju pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, namun hal ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Gunungkidul. Bahkan kalau dilihat dari data yang disajikan oleh BPS, Kabupaten Gunungkidul adalah wilayah yang paling adaptif dan mampu bertahan pada aspek ekonomi terhadap terjadinya kontraksi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Adapun secara regional gambaran laju pertumbuhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di wilayah DIY, dapat dilihat dari tabel berikut :

**Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di DIY Tahun 2016 - 2020**

Wilayah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Kabupaten Kulon Progo	4,76	5,97	10,84	13,49	-4,06
Kabupaten Bantul	5,06	5,10	5,47	5,53	-1,66
Kabupaten Gunungkidul	4,89	5,00	5,16	5,34	-0,68
Kabupaten Sleman	5,25	5,35	6,42	6,49	-3,91
Kota Yogyakarta	5,11	5,24	5,49	5,96	-2,42
D.I. Yogyakarta	4,95	5,05	6,20	6,59	-2,69

Sumber : \*) Angka Sangat Sementara BPS DIY Tahun 2021

**5. Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai pendapatan penduduk disuatu wilayah pada periode/tahun tertentu. Terdapat dua cara mengetahui pendapatan perkapita, yakni perhitungan berdasarkan harga berlaku yang disebut pendapatan perkapita nominal tanpa memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau laju inflasi. Kedua perhitungan berdasarkan harga berlaku yang disebut pendapatan perkapita riil dengan memperhitungkan laju inflasi.

Pada Tahun 2020 berdasarkan data BPS Kabupaten Gunungkidul dalam Buku Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2021 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku atau pendapatan perkapita nominal Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp.25.323.400,-. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,19% bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercapai sebesar Rp. 25.372.220,-. Hal ini merupakan dampak dari kontraksi ekonomi yang terjadi menyusul sebagai akibat dari bencana non alam pandemi Covid-19.

**Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Gunungkidul**



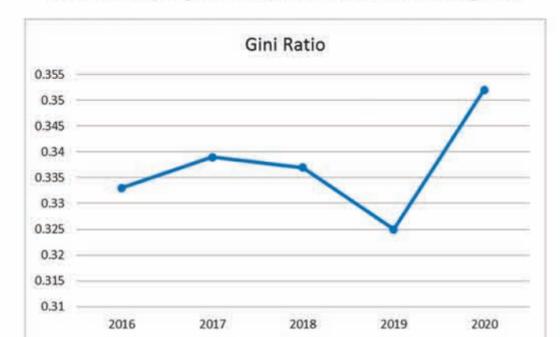
Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 (diolah)

**6. Ketimpangan Pendapatan**

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan sebagai ukuran kemiskinan relatif adalah distribusi pendapatan. Pengukuran distribusi pendapatan diupayakan dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran, karena sulitnya memperoleh data pendapatan. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah Gini Ratio. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Nilai Gini Ratio semakin mendekati angka 1, maka dikatakan kesenjangan tingkat pendapatan penduduk makin melebar. Sebaliknya jika nilai Gini Ratio mendekati nol maka dikatakan tingkat pendapatan penduduk semakin merata. Gini Ratio dibagi menjadi tiga tingkatan : <0,3 kategori ketimpangan rendah, 0,3 – 0,5 kategori moderat, dan >0,5 masuk kategori ketimpangan tinggi (Oshima).

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul mencapai 0,352 (ketimpangan moderat), atau lebih tinggi dari tahun 2019 yang mencapai 0,325 dan tahun 2018 yang mencapai 0,337. Data dimaksud menunjukkan bahwa meskipun mengalami kenaikan, namun distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul masih dalam kategori moderat. Dan jika dibandingkan Kabupaten/Kota lain di DIY, nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terendah, dengan kata lain ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Gunungkidul lebih merata dibanding kabupaten/kota lain.

**Grafik Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Gunungkidul**



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 (diolah)

**B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

Tahun 2020 merupakan tahun efektif terakhir masa perencanaan dalam RPJMD 2016-2021 dan tahun kedua penerapan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Regulasi tersebut mengamanatkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kondisi belum ideal masih terjadi, dimana penerapan SPM belum dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan karena sesuai ketentuan RPJMD 2016-2021 sudah tidak dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan regulasi baru SPM mengingat RPJM Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 telah memasuki tahap akhir masa perencanaan dan pernah dilakukan peninjauan. Terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada refocusing dan realokasi anggaran program kegiatan juga semakin memperberat kinerja penerapan SPM di Tahun 2020. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad dan semangat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, untuk menerapkan SPM semaksimal mungkin